JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Penyuluhan Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Digitilasasi Desa di Desa Tamban Baru Mekar Kabupaten Kapuas

Sitna Hajar Malawat [1], Abdul Haliq[2], Normajatun[3], Ridwan Syarani[4], Budi Setiawati[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Sitna Hajar Malawat
sitna.shm2@gmail.com

Abstrak:

Di era Digitalisasi, masyakarat dituntut mampu melek teknologi terhadap apapun bentuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, begitu pula ranah pemerintahan desa. Bagi warga masyarakat dalam memahami informasi/kebijakan2 yang disosialisasikan oleh pemerintah dan menggunakan layanan digital dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini kantor desa sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu memfasilitasi keterbukaan informasi publik tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan aksesibiltas layana publik melalui digitalisasi desa. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini pada khususnya adalah warga desa tamban baru mekar kecamatan tamban catur kabupaten kapuas. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Layanan, Publik, Digitalisasi, Desa*

Pendahuluan

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Permasalahan yang terjadi, Di Desa tamban baru mekar kecamatan tamban catur, masih banyak warga desa yang belum memahami informasi-informasi yang tersedia di kantor desa tamban baru mekar, bahkan andaipun beberapa informasi ditempel di dinding kantor, masih belum dapat terbaca jelas, karena informasi yang ditempelkan hanya berupa lembaran fotokopian/printan. Bagi para lansia yang datang tentu hal ini menyulitkan untuk dibaca.

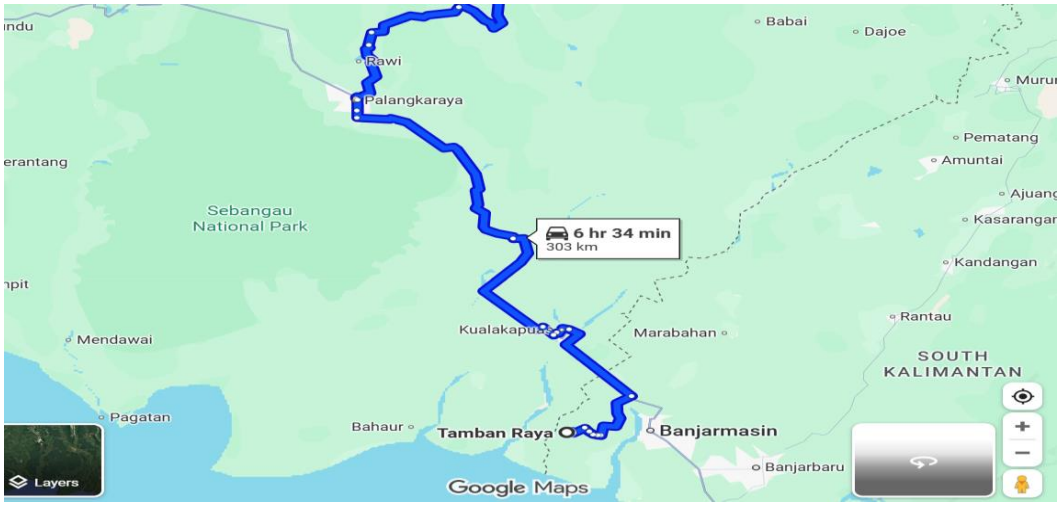
Digitalisasi Desa yang baik, jelas dan menarik tentu bermanfaat bagi warga masyarakat dalam memahami informasi/kebijakan2 yang disosialisasikan oleh pemerintah dalam hal ini kantor desa sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu memfasilitasi keterbukaan informasi publik tersebut salah satunya dengan menyediakan tampilan Digitalisasi Desa yang menarik dan jelas dibaca warga masyarakat.

Oleh karena itu pengabdian ini mengambil tempat di Kantor Desa tamban baru mekar, Kecamatan tamban catur Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan kegiatan ini, karena dari lingkup Kantor Desa yang dihadiri masyarakat, tokoh masyarakat dan pejabat Kantor Desa setempat diharapkan dapat lebih menginformasikan ke aparatur desa yang lain bahwa pentingnya ikut serta berpartisipasi menjadi aparatur desa yang baik dengan meningkatkan kemampuan yang berkenaan dengan design digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara pelayanan public. Prioritas permasalahan mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana agar aparatur desa tamban baru mekar dapat Meningkatkan Pemahaman dan penggunaan Digitalisasi Layanan Publik melalui website desa dan partisipasinya.

Tujuan dan manfaat kegiatan. 1. Memberikan pemahaman mengenai Digitalisasi layanan publik Desa 2. Memberikan pelatihan cara menggunakan layanan desa via wesite desa 3.Menambah partisipasi Aparatur Desa sebagai penyelenggara layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah agar masig melakukan sosialisasi kepada warga desa dalam menggunakan layanan publik berbasis digitalisasi desa.

Metode Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di kantor desa tamban baru mekar kecamatan tamban catur Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah. Metode Pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dokumentasi; Metode Pengabdian (persiapan selama 1 minggu, kegiatan penyuluhan dilakukan selama 3 jam).



Gambar. 1 Peta Desa Tamban Baru Mekar

Copyright © 2025 The Author(s)

Tempat pelaksanaan di kantor desa tamban baru mekar kecamatan tamban catur Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah. Metode Pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dokumentasi; Metode Pengabdian (persiapan selama 1 minggu, kegiatan penyuluhan dilakukan selama 3 jam. Indikator Keberhasilan pada kegiatan ini yaitu dimana masyarakat desa yang tadinya belum paham dengan penggunaan website desa saat itu langsung memahami dan mempraktekkan penggunaan website desa, salah satu yang mereka langsung gunakan adalah pembuatan surat keterangan tidak mampu, karena anak mereka ada yang dapat beasiswa dari perguruan tinggi. Metode Evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan pada kegiatan ini, sebelum materi dimulai para narasumber memberikan pretest mengenai pengetahuan warga desa terkait website desa tamban baru mekar terkait kemudahan penggunaan dan partisipasi mereka dan hasilnya 30% belum memahami penggunaan website desa dan ketika materi selesai dipaparkan dan sessi diskusi serta tanya jawab berakhir kami mengadakan post test dan hasilnya 70% warga desa tamban baru mekar sudah memahami penggunaan website desa dan langsung mengaplikasikannya dalam pembuatan administrasi kependudukan).



Gambar 2. Narasumber


Gambar 3. Foto bersama seluruh peserta kegiatan



Gambar 4. Website Desa Tamban Mekar Mekar



Gambar 5. Sessi Tanya Jawab

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini di mulai dengan sambutan oleh Kepala Desa Tamban Baru Mekar dengan waktu selama 10 menit. Selanjutnya di berikan penyuluhan selama 1 jam yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama ceramah yaitu menyampaikan secara lisan materi yang telah disiapkan kepada peserta penyuluhan, dan kepada maing masing peserta di berikan fotocopy materi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua tanya jawab. Pada sesi kedua pemateri memberikan materi tentang Partisipaasi masyarakat dalam digitalisasi desa selama kurang lebih 1 jam. Kemudian

diteruskan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan pemateri penyuluhan memberikan jawaban.

Pada sesi taya jawab, perwakilan RT. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan sebanyak 4 orang peserta, yakni bapak Amat, Bapak Samsudin, Bapak Aspani, dan Bapak Zulkifli. Pertanyaan yang di ajukan peserta pada dasarnya sama, seperti pertanyaan tentang bagaimana bagaimana menimbulkan kesadaran pada diri sendiri terutama dalam kaitannya terhadap kepengurusan berkas-berkas administrasi. padahal salah satu peran warga masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik adalah dengan sadar administrasi kependudukan, karena ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus segala macam surat-surat administrasi yang diperlukan oleh masyarakat di kemudian hari. Setelah itu, akhirnya pemateri secara bergantian menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari para warga masyarakat yang bertanya.

Dalam diskusi lanjutan, peserta mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan mampu membuka ruang refleksi mengenai pentingnya membangun relasi komunikasi yang lebih horizontal antara pemerintah desa dan masyarakat. Bahkan, beberapa perwakilan menekankan perlunya forum tematik yang lebih inklusif agar suara kelompok rentan dapat diakomodasi dalam proses pembangunan dalam digitalisasi desa.

Dari perspektif kelembagaan, kegiatan ini juga memperlihatkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola partisipasi masyarakat secara sistematis. Fasilitator menekankan pentingnya penggunaan kanal informasi desa—melalui papan informasi, media sosial desa, atau pertemuan rutin—agar proses transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Selain itu, rekomendasi peningkatan kapasitas warga melalui pelatihan advokasi kebijakan, fasilitasi musyawarah, dan pengelolaan data pembangunan desa dinilai relevan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu temuan penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya perhatian warga desa terhadap potensi penggunaan website desa sebagai media partisipasi digital. Selama sesi khusus mengenai literasi digital desa, fasilitator memperkenalkan posisi strategis website desa dalam tata kelola informasi publik, terutama sejak diberlakukannya berbagai regulasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi pada tingkat pemerintahan desa. Website desa dipahami bukan sekadar sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi sebagai instrumen interaktif yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta memantau proses pembangunan secara lebih sistematis.

Pada diskusi tersebut, peserta menyadari bahwa akses digital memberikan peluang signifikan untuk memperkuat partisipasi, terutama di era di mana interaksi masyarakat dengan pemerintah semakin bergerak menuju model pemerintahan berbasis teknologi informasi. Melalui website desa, warga dapat memperoleh informasi mengenai dokumen perencanaan desa, laporan keuangan, agenda musyawarah, dan perkembangan program pembangunan. Kemampuan untuk mengakses informasi ini dianggap dapat mengatasi hambatan struktural yang sebelumnya ditemukan, seperti kurangnya sosialisasi program dan keterbatasan komunikasi antarwarga dan pemerintah desa.

Selain sebagai sarana transparansi, website desa juga diposisikan sebagai ruang interaktif bagi warga. Pada sesi pelatihan, peserta diperkenalkan pada fitur-fitur yang memungkinkan partisipasi langsung, seperti kolom pengaduan, formulir aspirasi, serta feedback mechanism terhadap program desa. Warga desa menunjukkan antusiasme terhadap fitur-fitur tersebut, terutama kelompok pemuda yang selama ini lebih akrab dengan platform digital. Potensi ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi desa dapat membuka peluang partisipasi yang lebih inklusif dan menurunkan hambatan kultural,

Copyright © 2025 The Author(s)

karena warga dapat menyampaikan pandangan tanpa harus berhadapan secara langsung dengan perangkat desa, yang selama ini dianggap menghambat ekspresi kritis.

Di sisi lain, kegiatan ini mengidentifikasi adanya kesenjangan literasi digital yang cukup signifikan antar kelompok usia dan latar belakang pendidikan. Sementara kelompok pemuda menunjukkan kemahiran dalam menggunakan website desa, sebagian warga lanjut usia dan kelompok perempuan mengaku belum familiar dengan teknologi tersebut. Temuan ini menegaskan perlunya strategi pendampingan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan navigasi website desa, pendampingan teknis berkala, dan penyediaan fasilitas internet publik seperti wifi corner atau pusat layanan digital desa. Pendekatan ini sejalan dengan teori-teori pembangunan berbasis teknologi informasi yang menekankan pentingnya digital inclusion untuk mencegah kesenjangan partisipasi dalam masyarakat.

Lebih jauh, diskusi mengenai website desa juga membuka perspektif baru bagi perangkat desa terkait pentingnya pengelolaan konten yang konsisten, akurat, dan mudah dipahami. Peserta dari kalangan aparatur desa mengakui bahwa selama ini website desa kurang dioptimalkan karena belum adanya petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi. Dalam kegiatan ini, fasilitator memberikan rekomendasi teknis mengenai pembentukan tim pengelola informasi desa, penyusunan SOP publikasi, serta integrasi website desa dengan media sosial resmi desa untuk meningkatkan jangkauan partisipasi. Integrasi peran website desa dalam proses pembangunan kemudian dibahas dalam kerangka e-governance, yang menekankan bahwa pemerintah desa tidak hanya bertugas memberikan layanan administratif, tetapi juga perlu memfasilitasi ruang pembelajaran digital bagi warga. Dengan demikian, website desa menjadi instrumen strategis dalam menghubungkan warga dengan proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, serta menstimulasi terbentuknya budaya partisipasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pada tingkat praktis, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa website desa memiliki potensi besar untuk memperkuat partisipasi warga apabila dikelola secara berkelanjutan dan inklusif. Warga yang sebelumnya pasif dalam forum-forum musyawarah mulai melihat website sebagai saluran alternatif untuk berkontribusi. Hal ini menandai adanya pergeseran budaya partisipasi dari pola konvensional yang mengandalkan pertemuan tatap muka menuju pola partisipasi hibrida yang menggabungkan tatap muka dan media digital. Dengan demikian, pemanfaatan website desa tidak hanya memperbaiki alur komunikasi, tetapi juga memperkuat kapasitas deliberatif warga desa dalam pembangunan. Jika dipadukan dengan peningkatan literasi digital dan komitmen aparatur desa dalam tata kelola informasi, website desa berpotensi menjadi fondasi penting dalam mengembangkan ekosistem pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Secara umum penyuluhan ini dapat dikatakan berhasil karena para peserta penyuluhan mengikuti dengan tekun dan tertib terhadap materi ceramah yang di sampaikan. Bahkan setelah dilakukan tanya jawab, para peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti peyuluhan pengetahuan dan pemahaman mereka bertambah. Bahkan warga setempat mengharapkan ada penyuluhan dan sosialisasi program- program pemerintah yang lain selain ini. Setelah mengikuti penyuluhan ini diharapkan mereka dapat menyebarluaskan informasi mengenai partisipasi dalam mewujudkan gerakan sadar administrasi kependudukan kepada anggota keluarga, teman serta tetangga di

sekitar tempat tinggalnya. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa materi penyuluhan yang disampaikan telah berhasil mencapai sasaran yaitu memberikan informasi serta menambah pengetahun dan pemahaman bagi peserta. Disamping itu tumbuhnya motivasi dari para peserta untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai bidang ilmu tertentu. Dengan demikian penyuluhan ini tidak sia-sia dilaksanakan.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksana kegiatan PKM ini yaitu Bapak A s s o c . Prof. M. Zainul M.m selaku Rektor UNISKA Banjarmasin, Ibu Dr. Dewi Merdayanty M.AP, selaku Dekan FISIP UNISKA, Bapak H. Idzani Muttaqin selaku Kepala Pusat Pengabdian UNISKA, Kepala Desa tamban baru mekar beserta Jajaran, Seluruh Ketua RT DAN RW dilingkungan Desa Tamban Baru Mekar Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas dan Warga desa tamban baru mekar Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas

Referensi

Barata, A. A. (2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputindo.

Basrowi, & Asuwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta, Indonesia: Gajah Mada University Press.

Hanif, N. (2005). Teori dan Praktik Pemeritahan dalam Otonomi Daerah. Jakarta, Indonesia: Grasindo.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.

Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Bandung, Indonesia: Mandar Maju.

Mulyono. (2008). Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogyakarta, Indonesia: Ar-ruz Media.

Ratminto, & Atik Septi Winarsih. (2006). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Sastroatmojo, S. (1995). Perilaku Politik. Semarang, Indonesia: IKIP Press.

Sinambela, P. L. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Publik. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Surjadi. (2012). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.